

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 setelah China, India dan Amerika Serikat yakni sebanyak 251.543.400 jiwa. Kekayaan alam dan keragaman suku serta budaya menjadi aset penting yang dimiliki oleh Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah mulai dari tambang mineral dan gas, keanekaragaman flora dan fauna, hingga kekayaan laut belum dimanfaatkan secara optimal menjadi catatan penting dalam pembangunan nasional. Upaya optimalisasi ini bukan hanya tugas pemerintah sebagai pemangku kebijakan, namun ini juga menjadi tugas semua elemen masyarakat.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia belum mampu untuk membebaskan Indonesia dari permasalahan ekonomi. Misalnya saja masalah kemiskinan yang mencapai angka 10,7 persen.¹ Selain kemiskinan, Indonesia juga dihadapkan dengan masalah pengangguran yang tidak kunjung selesai. Jumlah penduduk yang terus bertambah sementara jumlah lapangan kerja yang tersedia jumlahnya terbatas menyebabkan angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data yang Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa pada Bulan Agustus 2016 disebutkan pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5.61 %. Masalah pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab jika angka pengangguran di sebuah

¹ <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/aNrwVrab-menaker-angka-kemiskinan-dan-ketimpangan-sosial-menurun> (diakses pada 16 Mei 2017 Pukul 10.12 WIB)

negara tinggi, maka akan memberikan dampak bagi perekonomian suatu negara. Secara ekonomi, pengangguran akan menimbulkan pemborosan akibat adanya sumber daya yang tidak termanfaatkan yang seharusnya dapat menggerakkan roda perekonomian. Selain itu pengangguran akan menyebabkan rendahnya pendapatan perkapita suatu negara.²

Pengangguran tidak hanya berdampak pada perekonomian suatu negara, namun juga berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan suatu negara. Tingginya angka pengangguran dapat meningkatkan angka kriminalitas dan berdampak pada rendahnya keamanan di suatu negara. Hal tersebut dapat berdampak luas dan mengganggu kestabilan pemerintahan. Tingginya angka pengangguran akan meningkatkan kriminalitas dalam sebuah negara. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah pengangguran dari tahun 2014 ke tahun 2015 yang diikuti dengan meningkatnya kriminalitas. Pengangguran pada tahun 2014 mencapai 7,24 juta jiwa sementara tahun 2015 meningkat menjadi 7,56 juta jiwa. Sementara angka kriminalitas pada tahun 2014 sebanyak 325.317 kasus meningkat pada tahun 2015 menjadi 352.936 kasus.

Pembangunan yang dilakukan akan lebih maksimal jika ditunjang oleh adanya peran masyarakat. Menurut Sugi Hermanto seorang dosen Universitas Palangkaraya partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil,

² Harjanto. Totok, "Pengangguran dan Pembangunan Nasional", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2 No. 2, April 2014.

hingga evaluasi program.³ Peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan implementasi dari UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, tentunya mustahil untuk menurunkan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Salah satu peran masyarakat yang akan memberikan dampak besar bagi pembangunan adalah dengan menjadi wirausahawan. Sebab wirausahawan dapat membuka lapangan pekerjaan dan nantinya akan mengurangi pengangguran serta menambah pendapatan bagi negara melalui pembayaran pajak.

Pemerintah terus berupaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satu caranya adalah dengan menanamkan dan mengembangkan jiwa serta minat berwirausaha pada masyarakat. Tinggi rendahnya persentase wirausahawan disuatu negara dapat menjadi acuan bagi perkembangan ekonomi. Negara maju memiliki jumlah wirausahawan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara berkembang dan negara miskin.⁴ Wirausahawan di Indonesia saat ini hanya 1.5 % dari jumlah penduduk. Indonesia masih membutuhkan 1.7 juta wirausahawan untuk mencapai angka dua persen. Sedangkan di negara ASEAN tercatat Singapura memiliki 7 persen wirausaha, Malaysia sebanyak 5 persen, Thailand 4.5 persen dan Vietnam memiliki wirausahawan sebanyak 3.3 persen dari total jumlah penduduknya.⁵

³ Hermanto. Sugi, "Peran Masyarakat dalam Pendidikan", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 2 No. 2, Desember 2014

⁴ Hendro, *Dasar-dasar Kewirausahaan*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 7

⁵ <http://www.suara.com/bisnis/2016/05/09/133306/jumlah-pengusaha-di-indonesia-baru-15-persen-dari-total-penduduk> (diakses pada 16 Mei 2017, pukul 9.29 WIB)

Kurang berkembangnya wirausahawan di Indonesia disebabkan oleh adanya sikap pandang, pola pikir, atau penilaian-penilaian tertentu dalam masyarakat.⁶ Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki orientasi sebagai pencari kerja dan menganggap bahwa menjadi wirausahawan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan harta melimpah semata. Selain itu mereka juga tidak memiliki keberanian dalam mengambil resiko.

Selain hal tersebut, menurut Astamoen dalam bukunya yang berjudul *Entrepreneurship* ada pula faktor psikologis yang menyebabkan masyarakat enggan untuk berwirausaha. Di antaranya adalah karena penghasilannya yang tidak tetap. Sebagian besar orang tua lebih mengarahkan anaknya untuk bekerja pada bidang-bidang yang menjanjikan. Salah satunya adalah dengan menjadi pegawai negeri sipil. Pekerjaan tersebut dinilai lebih terhormat dibandingkan dengan menjadi seorang wirausaha.

Berbeda jauh dengan apa yang terjadi di negara-negara maju seperti Amerika. Mereka memiliki keinginan yang sangat besar untuk membuka peluang usahanya sendiri. Keinginan untuk sukses dan menghimpun kekayaan dari perusahaan yang ia dirikan. Selain itu, lingkungan yang tercipta memberikan motivasi bagi mereka untuk berlomba-lomba merintis usahanya. Dalam aspek lain, keberanian untuk berwirausaha juga didorong oleh guru sekolah dan sekolah yang memberikan mata pelajaran kewirausahaan. Materi pembelajaran dikemas semenarik mungkin

⁶ P. Astamoen. Moko, *Entrepreneurship*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 151

untuk menumbuhkan minat siswa berwirausaha. Hal tersebut terjadi pada alumni MIT, Harvard University dan perguruan tinggi lainnya.⁷

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan jumlah wirausahawan di Indonesia. Diantaranya adalah dengan memerintahkan Bank untuk mempermudah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang sangat rendah yakni sebesar 9 persen. Sementara pada 2017 ditargetkan akan ada penurunan bunga KUR menjadi 7 persen.⁸ Hal ini dilakukan semata untuk meningkatkan peroduktivitas masyarakat dan menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Kemudahan kredit bukanlah satu-satunya cara untuk mencetak wirausahawan baru di Indonesia. Perlu adanya pelatihan dan pengarahan yang dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kreatif dan inovatif untuk membangun usaha. Sebab tanpa adanya pelatihan dan pengarahan, masyarakat akan mengalami kebingungan untuk memulai usahanya.

Penumbuhan minat berwirausaha juga perlu ditanamkan sejak dini pada anak. Salah satu tempat yang paling efektif untuk menumbuhkan minat berwirausaha adalah melalui pendidikan. Menurut Ir. Ciputra, pendidikan kewirausahaan akan mampu menghasilkan dampak nasional yang besar apabila pendidikan kewirausahaan ini mampu menghasilkan empat juta wirausahawan baru dalam jangka 25 tahun yang akan datang.⁹

⁷ Alma. Buchari, Kewirausahaan, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 6-7

⁸ <http://presidenri.go.id/industri/produktivitas-untuk-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi.html> (diakses pada 16 Mei 2017, pukul 10.20 wib)

⁹ F. R Sinay, Pendidikan Anak Berwawasan Kewirausahaan, 2015, h. 2 (http://www.ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1090)

Jumlah anak usia 7 – 18 tahun atau anak usia sekolah di Indonesia sekitar 51.384.986 jiwa atau 20,4 % dari jumlah penduduk Indonesia.¹⁰ Hal ini menandai bahwa bidang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia memerlukan perhatian yang cukup serius. Hal tersebut sejalan dengan amanat UUD Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: “*setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*”. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai peserta didik. Sementara pada Pasal 31 Ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “*setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya*”. Selain kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar serta menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Hal ini berkaitan dengan pencapaian cita-cita bangsa untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan sosial.¹¹ Pendidikan juga memiliki fungsi untuk memberikan arahan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Sektor pendidikan memiliki peranan penting dalam membangun pola pikir dan nilai-nilai sejak dini. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan dari pendidikan Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang pendidikan nasional yang berbunyi :

¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Indonesia Educational Statistics in Brief 2014/2015*. h. 2

¹¹ Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. (Bandung: PT. Remaja Roskadarya. 2014), h. 12

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Peningkatan kualitas hidup manusia merupakan salah satu tujuan dari pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan menjadi dasar dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan harus diselenggarakan secara sistematis dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan teknologi. Penyelenggaraan pendidikan yang baik perlu didukung oleh semua elemen masyarakat diantaranya kepala sekolah, guru dan peserta didik.

UUD Tahun 1945 telah mengamanatkan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang tertuang dalam Pasal 31 Ayat 4. Pengalokasian anggaran untuk dana pendidikan tersebut merupakan perwujudan dari perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan. Sebab pendidikan disadari sebagai dasar dari upaya membangun peradaban manusia. Pemerintah setiap tahunnya selalu berupaya berinovasi dan mengevaluasi sistem pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan tidak mengabaikan kearifan lokal yang sejak dulu tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan pengembangan kurikulum yang disesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Kurikulum yang berkembang di

Indonesia disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan.

Menurut Nasution, kurikulum merupakan *“rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar dibawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya”*.¹² Dalam perkembangannya, kurikulum tidak hanya terbatas pada kegiatan belajar mengajar yang sifatnya formal. Kurikulum juga merencanakan kegiatan serta peristiwa yang tidak formal seperti kegiatan ekstrakurikuler. Kurikulum yang tidak formal dianggap sebagai pelengkap kurikulum formal. Sebab peserta didik tidak hanya memerlukan kecakapan dalam akademik semata. Lebih dari itu, peserta didik juga memerlukan kecakapan lain untuk mendukung kehidupannya dimasa yang akan datang.

Kurikulum terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kurikulum 2013 edisi revisi sebagai penyempurnaan kurikulum 2013 yang sebelumnya telah disusun. Dalam kurikulum ini terdapat 3 aspek penilaian terhadap siswa yakni aspek pengetahuan, aspek keterampilan, serta aspek sikap dan perilaku. Ketiga aspek tersebut memiliki bobot yang berbeda pada setiap tingkat satuan pendidikannya. Selain itu dalam kurikulum ini juga diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya. Peserta didik diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan yang baik, namun juga memiliki karakter yang baik. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang kerangka dasar

¹² Nasution, *Kurikulum & Pengajaran*, (Bandung: Bumi Aksara, 2012), h. 5

dan struktur kurikulum Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah sebagai berikut:

“Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.”

Kurikulum 2013 memuat mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan yang dimuat dalam pelajaran di tingkat SMA sederajat. Hal ini disadari sebagai upaya dalam menumbuhkan jiwa wirausaha pada siswa SMA sederajat sebagaimana yang tercantum dalam salah satu tujuan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Siswa tidak hanya dipersiapkan untuk menguasai ilmu pengetahuan semata namun juga perlu dipersiapkan untuk melihat dan memanfaatkan peluang yang ada disekitarnya. Dengan kata lain, siswa sudah diajarkan untuk membuka peluang dan kesempatan kerja untuk diri sendiri dan orang lain.

Pembelajaran memiliki 3 aspek penting yang dilakukan oleh guru yakni tahap persiapan, pengajaran dan evaluasi. Penelitian ini difokuskan pada tahap evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, penilaian diartikan sebagai berikut :

“Standar penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester,

ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah.”

Pada kurikulum 2013 penerapan penilaian otentik sebagai standar penilaian pada kurikulum 2013 yang diharapkan dapat memberikan dampak positif kedepannya. Penilaian otentik merupakan bentuk penilaian yang merujuk pada penilaian ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan secara berimbang. Namun pada kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru yang kesulitan memahami cara penilaian dalam kurikulum 2013. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Ani Rusilowati terhadap 20 dai 23 guru SMP Negeri 21 Semarang, menjelaskan bahwa 66% guru masih kesulitan dalam memahami berbagai model pembelajaran dan 79% guru masih mengalami kesulitan membuat instrumen penilaian¹³

Penilaian yang dilakukan oleh pendidik merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian dapat dilakukan oleh pendidik selama proses pembelajaran berlangsung atau penilaian proses serta penilaian yang dilakukan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan atau penilaian hasil.¹⁴

¹³ Tutut Wdowati et al., Pengembangan instrumen penilaian otentik berbasis *scientific literacy* pada pembelajaran fisika di SMA sebagai implementasi kurikulum 2013. (Semarang : Universitas Negeri Semarang : 2016), p. 2

¹⁴ <http://pemerintah.net/sistem-penilaian-kurikulum-2013/> (diakses pada 25 mei 2017, pukul 20.38 wib)

Penilaian pada pelajaran Prakarya dan kewirausahaan yang dilakukan di SMA Negeri 12 Jakarta dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung serta setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Saat pembelajaran berlangsung, guru melakukan penilaian dengan memberikan pertanyaan secara lisan kepada siswa. Selain itu, penulis juga melakukan penilaian setelah pembelajaran dilaksanakan dengan ulangan harian, ulangan tengah semester serta ulangan akhir semester. Ujian yang diberikan kepada siswa berdasarkan pada materi yang telah diberikan sebelumnya sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi atau penilaian yang dilakukan guru mencakup 3 aspek penilaian. Diantaranya adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada penelitian ini, instrumen penilaian yang akan dikembangkan adalah penilaian pada aspek afektif. Aspek ini dipilih karena berdasarkan hasil pengamatan, penilaian yang dilakukan sebatas penilaian pada aspek kognitif dan afektif semata. Selain itu, pada pelajaran PKWU ini *output* yang diharapkan bukan sekedar pengetahuan mengenai materi. Namun bagaimana siswa dapat mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Metode penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan agar dapat digunakan oleh masyarakat luas maka diperlukan pengujian keefektifan produk tersebut. Jadi metode penelitian ini memiliki sifat logitudinal (bertahap bisa *multy years*). Metode penelitian dan pengembangan ini bukan merupakan metode yang baru. Melainkan sudah banyak digunakan dalam bidang-bidang Ilmu Alam dan Teknik. Metode ini digunakan

untuk pengembangan semua produk teknologi seperti kendaraan, alat-alat kedokteran, bangunan dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan metode penelitian dan pengembangan juga digunakan dalam penelitian bidang ilmu-ilmu sosial salah satunya adalah pendidikan.¹⁵

Dalam dunia pendidikan persentase penelitian dan pengembangan hanya 1% dari biaya pendidikan secara keseluruhan. Lain halnya dengan penelitian dan pengembangan pada industri yang menggunakan hampir 4% biaya yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dan pengembangan mengenai penilaian aspek psikomotor pada praktik prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 12 Jakarta.

Kompetensi yang ingin dicapai dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan bukan sekedar pengetahuan mengenai materi. Melainkan juga untuk mendorong kreativitas siswa untuk menciptakan barang yang memiliki nilai jual. Penilaian yang dilakukan oleh guru pelajaran lebih banyak fokus terhadap penilaian kognitif dan psikomotor serta kurang mengakomodir terhadap penilaian afektif.

B. Identifikasi Masalah

Persentase wirausahawan di Indonesia tertinggal jauh dengan presentase wirausaha di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Negara dalam hal ini Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup besar untuk menumbuhkan jiwa sebagai wirausaha kepada warganya. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memasukan pelajaran prakarya

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian. (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 297

¹⁶ Ibid, h. 298

dan kewirausahaan pada setiap jenjang pendidikan. Pendidikan yang dilakukan di sekolah memiliki 3 aspek penilaian yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Namun kejadian dilapangan menunjukkan bahwa penilaian afektif kurang diperhatikan oleh pendidik. Tidak adanya penilaian khusus yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai aspek afektif peserta didik khususnya pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Penelitian ini akan memfokuskan pada pengembangan instrumen penilaian afektif pada praktik prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 12 Jakarta.

C. Pembatasan Masalah

Pengembangan instrumen penilaian dibatasi hanya pada penilaian ranah afektif untuk siswa kelas XI SMA Negeri 12 Jakarta pada pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengembangan instrumen penilaian afektif pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 12 Jakarta?
2. Bagaimana langkah-langkah pengembangan instrumen penilaian afektif pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 12 Jakarta?
3. Apakah instrumen sudah memenuhi kriteria validitas dan reabilitas?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaar teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama dalam mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan instrumen penilaian aspek afektif, pelaksanaan penyusunan instrumen penilaian mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengadakan penelitian-penelitian yang lain.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi guru

- 1) Memberikan pemahaman pada guru bahwa penilaian memerlukan instrumen penilaian yang baik
- 2) Membantu guru meningkatkan penyusunan instrumen penilaian aspek psikomotor mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan.

b. Manfaat bagi siswa

- 1) Memberikan motivasi kepada siswa agar dapat mempelajari materi yang ada dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan lebih baik.
- 2) Meningkatkan hasil belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan

c. Manfaat bagi sekolah

- 1) Memberikan kontribusi pengetahuan mengenai instrumen penilaian
- 2) Menambah koleksi bacaan tentang pengembangan instrumen penilaian prakarya dan kewirausahaan.